

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Orientasi Politik

1. Pengertian Orientasi Politik

Orientasi politik merupakan cara pandang yang berhubungan erat dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat, orientasi politik suatu masyarakat dapat muncul dari dalam masyarakat itu sendiri atau dapat muncul dari luar masyarakat. Akan tetapi tanggapan anggota masyarakat terhadap orientasi itu berbeda-beda tergantung dari pengetahuan dan nilai-nilai yang dimilikinya.

Menurut Sjamsudin (1993: 8), orientasi seseorang bisa saja berubah sesuai dengan pengetahuan yang didapatnya dan nilai-nilai yang dimilikinya. Nilai-nilai itulah yang akan mempengaruhi, dan kadang-kadang dapat “membentuk”, keseluruhan “sikap” masyarakat terhadap suatu orientasi. Itulah yang muncul atau terpolakan keatas permukaan sebagai orientasi politik masyarakat Nilai-nilai itu dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal, yakni faktor yang berasal dari luar individu, yang dapat berupa informasi, pengetahuan, lingkungan, teman sepermainan dan sebagainya. Sedangkan faktor internal, yakni faktor yang berasal dari dalam diri individu, berupa pendidikan, keluarga dan sebagainya.

Menurut Goeltom dalam Mediastutie (2006: 15), orientasi politik merupakan suatu cara pandang masyarakat baik yang homogen maupun heterogen dalam struktur masyarakat tersebut, yang dilatar belakangi oleh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat maupun yang berada diluar masyarakat. Sehingga dapat membentuk sikap dan menjadi terpola oleh mereka untuk memandangi suatu objek politik

Menurut Nazarudin Sjamsuddin (1993: 10), orientasi politik masyarakat dapat berubah melalui dua cara yaitu dengan cara pemaksaan dan dengan cara persuasif. Jika orientasi politik masyarakat dilakukan dengan cara pemaksaan maka masalah yang akan timbul adalah:

a. Sikap Menentang

Suatu ciri yang menonjol yang melekat pada segala bentuk paksaan ialah bahwa tindakan itu tidak dikehendaki atau tidak disukai oleh yang menjadi sasaran pemaksaan. Reaksi yang lazim ditemui adalah sikap menentang. Penentangan terhadap suatu paksaan dapat saja mengambil bentuk yang keras ataupun lunak, tergantung kepada karakter daripada objek pemaksaan, disamping dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan dan aksi keras yang diberikan terhadap upaya pemaksaan itu dapat berkembang menjadi faktor yang mengancam stabilitas sistem politik.

b. Perubahan Sesaat

Berapa lama perubahan yang dilaksanakan itu dapat bertahan dalam masyarakat. Jelas bahwa sesuatu yang dipaksakan itu merupakan hal yang tidak disukai sehingga masyarakat tidak akan mampu memelihara atau

melestarikan orientasi yang dipaksakan itu, dan akan memberikan orientasi politiknya kepada penguasa pemerintah hal ini berarti bahwa orientasi politik akan hidup selama penguasa mampu menunjang kehadirannya kepada masyarakat

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, penulis memaknai bahwa orientasi politik adalah suatu cara pandang suatu individu atau golongan masyarakat terhadap fenomena-fenomena politik yang dilatar belakangi oleh nilai-nilai yang dimilikinya. Nilai-nilai tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal sehingga dapat membentuk sikap yang terpolat dalam memandang suatu objek politik.

2. Klasifikasi Orientasi Politik

Menurut Almond dalam Arifin Rahman (1998: 33-34), untuk mengetahui bagaimana sikap individu atau masyarakat terhadap sistem politik, kita dapat menggunakan tiga komponen orientasi politik, yakni komponen kognitif, komponen afektif, komponen evaluatif.

a. Orientasi Politik Kognitif

Orientasi politik kognitif dapat diketahui dari pengetahuan seseorang atau masyarakat tentang kepercayaan pada politik peranan, dan segala kewajibannya serta *input*, dan *output*nya dan juga untuk menilai tingkat pengetahuan seseorang mengenai jalannya sistem politik, tokoh-tokoh pemerintahan, kebijaksanaan yang mereka ambil, atau mengenai simbol-simbol yang dimiliki oleh suatu sistem politik.

b. Orientasi Politik Afektif

Orientasi Politik afektif akan berbicara tentang perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para actor dan penampilannya yang membuat seseorang menerima atau menolak suatu sistem politik.

c. Orientasi Politik Evaluatif

Orientasi ini mengenai keputusan dan pendapat tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan. Orientasi ini ditentukan oleh evaluasi moral yang telah dimiliki seorang dan juga berkaitan dengan evolusi normatif, moral politik dan etika politik

Menurut Almond dalam Arifin Rahman (1998: 35), orientasi seseorang dapat dilihat secara sistematis jika memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengetahuan apa yang dimiliki seorang tentang negara dan sistem politikya dalam pengertian umum, sejarah, ukuran lokasi, kekuasaan, sifat-sifat konstitusional dan lain-lain. Bagaimana perasaan-perasaannya terhadap karakteristik sistemik ini, dan bagaimana pendapatnya tentang kelebihan atau kekurangan serta penilainnya terhadap karakteristik yang sistemik tersebut?
- b. Bagaimana pemahaman seorang tentang struktur dan peranan, kaum elit politik dan pengajuan-pengajuan kebijaksanaan yang diperkenalkan di dalam arus pembuatan kebijaksanaan yang bersifat "upward"? bagaimana perasaan dan pendapatnya tentang segala struktur, dan individu-individu, keputusan-keputusan yang dilibatkan dalam seluruh rangkaian proses ini? Bagaimana perasaan dan pendapatnya terhadap hal-hal tersebut?

- c. Bagaimana pemahaman yang dimiliki tentang arus pengokohan kebijaksanaan yang "downward" struktur-struktur, individu-individu, keputusan-keputusan yang dilibatkan dalam seluruh rangkaian proses ini? Bagaimana perasaan dan pendapatnya terhadap hal-hal itu?
- d. Bagaimana perasaan pribadinya sebagai anggota sistem politik tersebut? Bagaimana pemahamannya tentang haknya, kekusaannya, kewajibannya dan strategi untuk dapat memasuki kelompok orang-orang yang berpengaruh? Bagaimana penilaiannya terhadap kemampuan norma-norma partisipasi dan penampilan apa yang diketahui dan dipergunakannya dalam membuat penilaian politik, atau dalam menyampaikan pendapatnya.

3. Kategori Orientasi Politik

Menurut Rusadi KantaPrawira (1998: 31), orientasi politik yang dimiliki seseorang terhadap objek-objek politik dapat dikategorikan menjadi:

- a. Orientasi positif, orientasi ini yang ditunjukkan dengan tingkat pengetahuan dan frekuensi kesadaran yang tinggi, perasaan dan evaluasi positif terhadap objek politik.
- b. Orientasi negatif, orientasi yang ditunjukkan dengan tingkat pengetahuan dan frekuensi kesadaran yang rendah, evaluasi dan perasaan negatif yang tinggi terhadap objek politik.
- c. Orientasi netral, orientasi yang ditunjukkan oleh frekuensi ketidakpedulian yang tinggi atau memiliki tingkat orientasi yang sangat terbatas bahkan tidak memiliki orientasi sama sekali terhadap objek-objek politik.

Kategori di atas sesuai dengan penjelasan Setiajid (2011), dengan mengutip pendapat Almond, bahwa orientasi seseorang terhadap obyek-obyek politik, diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Orientasi Positif, yaitu orientasi yang ditunjukkan dengan tingkat pengetahuan dan frekuensi kesadaran yang tinggi, perasaan dan evaluasi positif terhadap obyek politik.
- b. Orientasi Negatif, yaitu orientasi yang ditunjukkan dengan tingkat pengetahuan dan frekuensi kesadaran yang rendah, evaluasi dan perasaan negatif yang tinggi terhadap obyek politik.
- c. Orientasi Netral, yaitu orientasi yang ditunjukkan oleh frekuensi ketidakpedulian yang tinggi atau memiliki tingkat orientasi yang sangat terbatas bahkan tidak memiliki orientasi sama sekali terhadap obyek-obyek politik.

Kategori orientasi politik tersebut berhubungan dengan empat macam obyek politik, yaitu sebagai berikut:

- a. Sistem politik secara keseluruhan, yakni meliputi antara lain: intensitas pengetahuan, ungkapan perasaan yang ditandai oleh apresiasi terhadap sejarah, ukuran lingkup lokasi, persoalan kekuasaan, karakteristik konstitusional negara atau sistem politiknya.
- b. Proses *input*, meliputi antara lain intensitas pengetahuan dan perbuatan tentang proses penyaluran segala tuntutan yang diajukan atau diorganisasi oleh masyarakat, termasuk prakara untuk menerjemahkan atau mengkonversi tuntutan-tuntutan tersebut sehingga menjadi kebijaksanaan yang otoritatif sifatnya dengan demikian proses *input*

antara lain meliputi pula pengamatan atas partai politik, kelompok kepentingan, dan alat komunikasi massa yang nyata-nyata berpengaruh dalam kehidupan politik sebagai sarana penampung berbagai tuntutan.

- c. Proses *output*, meliputi antara lain: intensitas pengetahuan dan perbuatan tentang proses aktivitas berbagai cabang pemerintahan yang berkenaan dengan penerapan dan pemaksaan keputusan-keputusan otoritatif. Singkatnya berkenaan dengan fungsi pembuatan peraturan/perundang-undangan oleh lembaga legislatif, fungsi pelaksanaan aturan oleh eksekutif (termasuk birokrasi) dan fungsi peradilan.
- d. Diri sendiri, meliputi antara lain: intensitas pengetahuan dan frekuensi perbuatan seseorang dalam mengambil peranan di arena sistem politik. Dipersoalkan apakah yang menjadi hak, kekuasaan dan kewajibannya. Apakah yang bersangkutan dapat memasuki lingkungan orang atau kelompok yang mempunyai pengaruh atau bahkan bagaimana caranya untuk meningkatkan pengaruhnya sendiri. Kemudian lebih lanjut dipersoalkan kriteria apakah yang dipakainya dalam membentuk pendapat dalam masyarakat atau sebagai keseluruhan sistem politik.

4. Hubungan antara Orientasi Politik dan Budaya Politik

Menurut Nazarudin Sjamsudin (1993: 90), orientasi politik merupakan bagian dari budaya politik yang berkembang dimasyarakat. Budaya politik lazimnya sebagai seperangkat sikap, kepercayaan, dan perasaan warga negara terhadap sistem politik dan simbol-simbol (seperti bendera, bahasa dan lembaga-lembaga politik) yang dimilikinya.

Almond dan Verba dalam Arifin Rahman (1998: 43), mengartikan budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas dari warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada dalam sistem itu. Almond mengklasifikasikan budaya politik menjadi tiga macam, yaitu:

a. Budaya Politik Parokial

Suatu budaya politik di mana tingkat partisipasi politik sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif (misalnya tingkat pendidikan rendah). Budaya politik parokial menyatakan, ketiadaanya harapan-harapan terhadap perubahan yang diperbandingkan dengan sistem politiknya, dengan demikian parokialisme dalam sistem bersifat yang diferensiatif, lebih bersifat efektif dan orientatif daripada kognitifnya.

b. Budaya Politik Subyek

Suatu budaya politik di mana masyarakat sudah relatif maju baik sosial maupun ekonominya, tetapi masih relatif pasif. Budaya politik subyek sering terwujud dalam masyarakat yang tidak terdapat struktur masukan yang diferensiasi, sedangkan orientasi politik dalam sistem politiknya lebih bersifat normatif dan afektif daripada kognitif.

c. Budaya Politik Partisan

Suatu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Dalam budaya politik partisipan, orientasi politik secara eksplisit ditunjukkan kepada sistem secara keseluruhan, bahkan terdapat struktur, proses politik dan administratif.

B. Masyarakat

1. Pengertian Masyarakat

Menurut Koentjaraningrat (1998: 147), masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Masyarakat merupakan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Soekanto (2002: 148) berpendapat bahwa masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang melakukan interaksi berdasarkan hubungan-hubungan tersebut serta pola-polanya sesuai dengan kepentingan manusia dan kelompoknya yang terlihat dari adanya suatu identitas bersama.

Menurut Weber dalam Soekanto (2002: 24), masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Masyarakat adalah sistem dari kebiasaan atau tata cara dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan manusia, keseluruhan yang selalu berubah ini dinamakan masyarakat, masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial dan masyarakat selalu berubah

Selanjutnya Ralph Linton dalam Soekanto (2002: 27), berpendapat bahwa masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan

menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan pengertian masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dan menempati suatu wilayah tertentu dan menjalankan hubungan diantaranya dengan menjalankan suatu fungsi-fungsi tertentu yang saling menentukan satu sama lain.

2. Ciri-Ciri Masyarakat

Masyarakat merupakan suatu kelompok manusia yang secara nyata ada maupun fiktif bertempat di wilayah tertentu, di mana anggota-anggotanya memiliki kepentingan tertentu, mempunyai suatu kesamaan perasaan bahwa hanya dengan hidup demikianlah maka kebutuhan-kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidupnya dapat terpenuhi. Masyarakat juga dapat dimaknai sebagai hubungan antar manusia bersifat pribadi, kenal mengenal dengan akrab, sepahit-semanis, seduka-sesuka, disertai saling percaya mempercayai yang berakar pada kesatuan keturunan dan kesatuan keluarga, mempunyai kesatuan adat dan kepercayaan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Menurut Seokanto (2002: 150-151), ada beberapa unsur yang dapat dijadikan ciri suatu kelompok masyarakat, yaitu:

a. Seperasaan

Unsur perasaan akibat seseorang berusaha untuk mengidentifikasi dirinya dengan sebanyak mungkin orang dalam kelompok tersebut, sehingga kesemuanya dapat menyebutkan dirinya sebagai “kelompok kami”, “perasaan kami” dan sebagainya.

b. Sepenanggungan

Setiap individu sadar akan perannya dengan kelompok dan masyarakat sendiri memungkinkan perannya, dalam kelompok dijalankan, sehingga dia mempunyai kedudukan yang pasti dalam darah dagingnya sendiri.

c. Saling memerlukan

Individu yang tergabung dalam masyarakat setempat merasakan dirinya tergantung pada komunitasnya yang meliputi kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikologis.

Selanjutnya menurut Seokanto (2002: 154), masyarakat merupakan sekelompok manusia yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu sebagai satu kesatuan hukum, terorganisir, memiliki lembaga baik formal maupun non formal, dan berkaitan dengan hukum dan pemerintahan, memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Ada empat komponen penting dalam suatu kelompok yang bisa membentuk suatu masyarakat, yaitu sebagai berikut:

a. Interaksi

Interaksi dalam suatu kelompok merupakan faktor yang penting, karena melalui interaksi, individu dapat melihat perbedaan antara kelompok atau dengan istilah *coact*, yaitu orang yang secara serentak terikat dalam aktivitas yang sama namun tanpa komunikasi antara satu dengan lainnya.

b. Waktu

Sekumpulan orang yang berinteraksi dalam jangka waktu yang singkat dan tidak dapat digolongkan sebagai kelompok mempersyaratkan adanya interaksi dalam jangka waktu yang panjang, karena dengan ini ia akan

memiliki karakteristik atau ciri yang tidak dimiliki oleh kumpulan sementara.

c. Ukuran atau jumlah partisipan dalam kelompok

Dalam hal ini tidak ada ukuran yang pasti mengenai jumlah anggota dalam suatu kelompok.

d. Tujuan

Mengandung pengertian bahwa keanggotaan dalam suatu kelompok akan membantu individu menjadi anggota kelompok tersebut dapat mewujudkan satu atau lebih tujuannya.

Menurut Koentjaraningrat (1998: 165), manusia adalah makhluk yang hidup secara kolektif, berbagai kekurangan membuat manusia merasa butuh dengan orang lain. Dengan kolektifitas ini, manusia dapat hidup secara bahu membahu, saling membantu sehingga membuat manusia semakin kuat sehingga dapat bertahan dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Dalam kehidupan kolektif dapat kita lihat halnya dengan serangga yang dapat kita pelajari, karena mereka selalu berusaha untuk mencapai kolektifitas hidup sebagai makhluk. Walaupun demikian ada satu perbedaan yang mendasar antara kehidupan kolektif binatang dengan kehidupan kolektif manusia yaitu, bahwa sistem pembahagian kerja, aktifitas kerja sama, serta komunikasi dalam kehidupan kolektif binatang bersifat naluri. Sedangkan sistem pembagian kerja, aktifitas kerja sama serta berkomunikasi pada kehidupan kolektif manusia bukan bersifat naluri.

Manusia adalah makhluk yang memiliki akal yang dengan akalnya tersebut manusia dapat membayangkan dirinya serta peristiwa-peristiwa yang mungkin dapat terjadi pada dirinya, sehingga manusia dapat mengadakan pilihan serta seleksi pilihan serta seleksi terhadap berbagai alternatif dalam tingkah lakunya untuk mencapai efektifitas yang optimal dalam mempertahankan hidupnya. Jika ditemukan suatu tingkah laku yang kolektif dalam menanggulangi hidup, maka manusia cenderung untuk mengulanginya. Kemudian dengan komunikasi terhadap individu lain terutama terhadap keturunannya, maka ini akan menjadi suatu pola yang mantap. Hal inilah yang biasanya membentuk adat istiadat atau suatu kebiasaan dalam lingkungan kolektif.

Koentjaraningrat (1998: 168), menyatakan bahwa pola-pola tindakan dan tingkah laku manusia adalah hasil pembelajaran. Karena pembelajaran bersifat berubah begitu pula halnya yang terjadi dengan tingkah laku dan tindakan manusia. Seperti halnya pola kehidupan di Indonesia yang dahulunya hidup dari hasil pertanian dan tinggal di dalam rumah yang besar dalam kelompok kerabatnya yang luas. Kini dalam beberapa keturunan banyak diantara mereka yang tinggal di rumah-rumah gedung, apartemen dan tiap harinya melakukan kesibukan yang berbeda-beda seperti pada perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik sebagai direktur jenderal, menejer atau dalam bidang keaktifan lainnya. Namun demikian perubahan-perubahan ini tidak sama cepatnya pada satu kolektif manusia dan manusia lainnya di muka bumi. Ada yang mengalami perubahan secara cepat dan ada pula yang lambat.

Menurut Koentjaraningrat (1998: 172), proses ini mengakibatkan terjadinya aneka warna dalam kehidupan diberbagai tempat di muka bumi. Adanya sarana untuk berintegrasi menyebabkan warga dari suatu kolektif akan saling berintegrasi. Ikatan yang membuat suatu kesatuan manusia mejadi suatu masyarakat adalah pola tingkah laku yang khas mengenai faktor kehidupannya dalam batas kesatuan itu yang menjadi sebuah adat istiadat dan bersifat kontiniu. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berintegrasi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontiniu dan yang terikat oleh satu rasa identitas yang sama.

- a. Komunitas adalah satu kesatuan hidup manusia yang menempati suatu wilayah yang nyata dan berintegrasi menurut sistem adat istiadat dan terikat oleh rasa identitas komunitas.
- b. Kategori sosial adalah kesatuan manusia yang terwujud karena adanya suatu ciri yang objektif yang dapat dikenakan kepada manusia-manusia itu.
- c. Golongan sosial adalah kesatuan manusia yang terwujud karena suatu ciri yang dikenakan kepada masyarakat yang bersifat spesifik dari pihak luar
- d. Kelompok dan perkumpulan adalah adanya interaksi dari tiap anggota dengan adanya adat istiadat serta norma yang mengatur secara kontinuitas dan rasa identitas yang mempersatukan semua anggota.

Ciri khas kehidupan kolektif masyarakat adalah pembagian kerja yang tetap antara berbagai macam sub kesatuan atau golongan, ketergantungan individu pada individu lain dalam kolektif, kerja sama antar individu dan komunikasi antar individu

C. Pemilihan Kepala Daerah

1. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah

Menurut Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 58 menyebutkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;
- d. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;
- e. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
- g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- h. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
- i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- j. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan negara.
- k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- l. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- m. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum
- n. Mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
- o. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
- p. Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan
- q. Tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah.

Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung memiliki beberapa kelebihan atau keunggulan, sebagaimana dikemukakan Amirudin (2003: 184-186), yaitu:

- a. Kongkritisasi Demokrasi, dengan memberikan perspektif baru bahwa proses Pemilihan Kepala Daerah akan memenuhi kaidah proses demokrasi di dua level struktural dan kultural. Di level struktural, proses Pemilihan Kepala Daerah diduga akan lebih beradab karena melibatkan unsur Partisipasi publik yang makin meluas dari bawah sesuai aspirasi masyarakat lokal. Di level kultural, proses Pemilihan Kepala Daerah

memberi keleluasaan bagi merembesnya nilai-nilai transparansi, independensi dan kejujuran.

- b. Adanya kemungkinan kekerasan terhadap proses dan kekerasan terhadap data, sedikit berkurang.
- c. Berkurangnya praktek premanisme politik uang. Jika Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara langsung, kemungkinan politik uang dapat diminimalisasi

Sementara itu kelemahan dari Pemilu sistem langsung adalah sebagai berikut:

- a. Makin terpolarisasinya politik uang. Sistem Pemilu Langsung bukan berarti menjadi satu-satunya cara yang sanggup mengatasi politik uang.
- b. Kerawanan sosial politik. Jika politik uang tetap berjalan didukung dengan pengendalian diri dari bakal calon maupun massa pendukung yang rendah, sempurnalah kerawanan sosial potensial terlahir dalam sistem Pemilu secara langsung.
- c. Problem kelembagaan politik yang baru. Pemilu langsung bukanlah harus dipahami sebatas bahwa ia merupakan mekanisme demokrasi yang paling otentik.

2. Fungsi Pemilihan Kepala Daerah

Muhammad A.S. Hikam (2002), menyebutkan setidaknya ada beberapa fungsi terpenting Pemilu, yaitu sebagai berikut:

- a. Legitimasi politik

Melalui Pemilu, legitimasi pemerintah atau penguasa dikukuhkan karena pemerintah terpilih hakikatnya adalah pilihan rakyat terbanyak yang

memiliki kedaulatan. Dalam hal ini, kebijaksanaan yang dibuat pemerintah selaku *decision maker* akan memperoleh dukungan atau sangsi yang kuat, karena keduanya berlandaskan sepenuhnya pada aspirasi rakyat, bukan pemaksaan

b. Sirkulasi elit politik

Dengan Pemilu, terjadinya sirkulasi atau pergantian elit kekuasaan dilakukan secara lebih adil, karena warga negaralah yang langsung menentukan siapa yang masih dianggap memenuhi syarat sebagai elit politik dan siapa yang tidak. Secara tidak langsung ini pula menggambarkan bahwa Pemilu memiliki fungsi kontrol warga negara terhadap pemerintahnya.

c. Pendidikan politik Pemilu berfungsi sebagai alat untuk melakukan pendidikan politik bagi warga negara agar dapat memahami hak dan kewajiban politiknya. Dengan keterlibatan dalam proses pelaksanaan Pemilu, diharapkan warga negara akan mendapat pelajaran langsung tentang bagaimana selayaknya warga negara berkiprah dalam sistem demokrasi. Sehingga pada tataran selanjutnya akan mengakar pemahaman bahwa warga negara adalah pemegang kedaulatan tertinggi dan sangat menentukan gerak serta perjalanan bangsa dan negara.

D. Kerangka Pikir

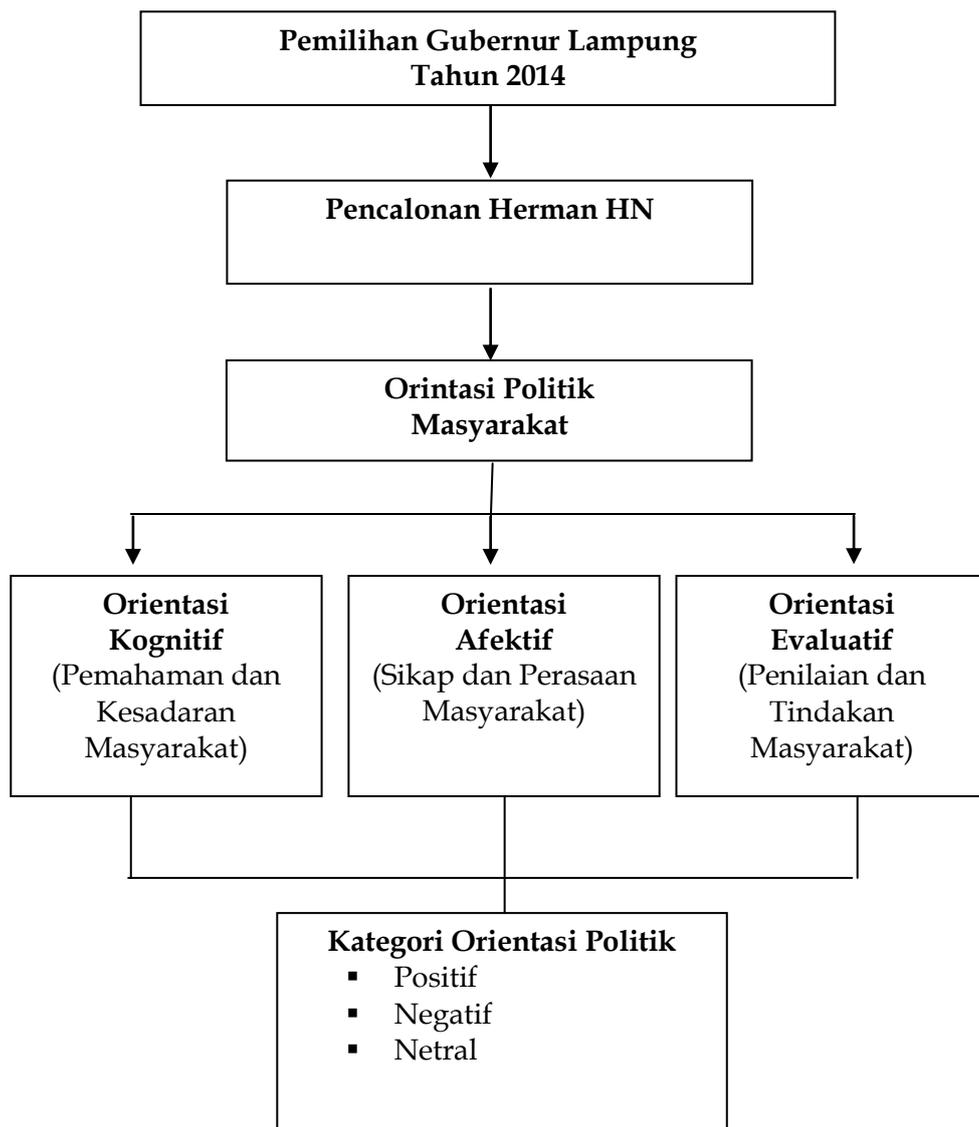
Setiap masyarakat yang mengikuti perkembangan politik tentunya memiliki orientasi politik. Orientasi politik merupakan suatu sikap dan cara pandang dari golongan masyarakat terhadap fenomena-fenomena politik. Sikap dan

cara pandang tersebut bisa dilatar belakangi oleh nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar masyarakat itu sendiri. Nilai-nilai yang berasal dari dalam seperti nilai-nilai budaya yang telah dimiliki oleh masyarakat dimana nilai-nilai tersebut telah tertanam. Sedangkan nilai-nilai yang berasal dari luar masyarakat seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, lingkungan dan sebagainya.

Komponen orientasi kognitif berkenaan dengan tingkat pengetahuan pemilih mengenai jalannya pemerintahan, simbol-simbol negara, simbol-simbol politik, tokoh-tokoh atau aktor-aktor pemerintahan dan kebijakan-kebijakan yang mereka ambil. Orientasi afektif berbicara tentang perasaan pemilih terhadap aspek-aspek politik. Sedangkan komponen evaluatif berbicara tentang penilaian terhadap sistem politik dan bagian-bagiannya. Orientasi evaluatif juga berkaitan dengan keputusan dan pendapat masyarakat terhadap partai politik pilihan, penyelesaian persoalan ekonomi, politik dan keamanan oleh pemimpin terpilih dan keterlibatan publik dalam kampanye.

Berbagai aktivitas politik praktis memiliki hubungan yang erat dengan orientasi, hal ini ditunjukkan oleh tingkah laku dan pola interaksi para politikus yang membentuk sistem dan struktur politik. Interaksi di antara struktur inilah yang selanjutnya memberikan dampak kepada orientasi politik masyarakat. Pembentukan komponen orientasi politik didasarkan pada keserasian atau ketidak serasian antara pelaksanaan politik praktis di lapangan dengan dengan nilai-nilai yang melandasi politik itu sendiri.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengenai Orientasi Politik Masyarakat Kota Bandar Lampung Terhadap Pencalonan Herman HN dalam Pemilihan Gubernur Lampung, sebagaimana dapat dilihat pada bagan kerangka pikir berikut ini:



Gambar 1.
Kerangka Pikir Penelitian